

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Daerah Asli (PPN) adalah salah satu komponen keuangan yang penting untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Meningkatnya PPN merupakan tanda kemampuan suatu daerah untuk mengelola potensi ekonominya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Komponen Pendapatan Daerah Asli (PPN) meliputi pajak daerah, pungutan daerah, pendapatan dari pengelolaan aset daerah tertentu, dan pendapatan tambahan lainnya yang diakui sah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (UU No. 1 Tahun 2022).

Salah satu komponen penting dari pendapatan daerah asli (PPN) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan ke daerah oleh masyarakat atau perusahaan sesuai dengan kewajiban hukum. UU No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa pelaksanaannya wajib, berfungsi untuk membiayai kepentingan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tidak secara langsung menguntungkan wajib pajak. Karena pajak daerah memainkan peran utama dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan, 2019), Untuk mendorong pertumbuhan regional dan meningkatkan layanan publik, pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang penting. Akibatnya, administrasi pajak daerah yang efektif dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai berbagai inisiatif ekonomi dan memberikan layanan publik. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengelola berbagai jenis pajak yang membentuk perpajakan daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang diawasi oleh administrasi distrik/kota adalah pajak iklan, yang dipungut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Penggunaan media promosi untuk menampilkan atau menciptakan antusiasme publik terhadap barang, jasa, atau acara tertentu dikenakan pajak iklan. Karena pentingnya bagi perluasan operasi periklanan bisnis di masyarakat, pajak iklan memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, kontribusi pajak iklan terhadap PAD masih relatif kecil di beberapa daerah. Berdasarkan penelitian (Irpan Jamil, 2023) Kontribusi rata-rata pajak iklan terhadap Pendapatan Daerah Asli (PPN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur antara tahun 2020 dan 2022 hanya sebesar 0,92%, artinya tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap PPN.

Kota Pariaman juga mengalami situasi serupa. Pada tahun 2025, pajak iklan hanya akan menyumbang 0,77% dari total pajak daerah, menurut data dari Dinas Pendapatan dan Manajemen Keuangan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PPN), pendapatan pajak iklan Kota Pariaman masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak diskusi mengenai pengelolaan pajak iklan di Kota Pariaman. Kesulitan yang dihadapi BPKPD di Kota Pariaman dalam meningkatkan penerimaan pajak iklan menjadi pokok pembahasan ini. Selain itu, penting untuk memahami inisiatif yang diambil untuk memastikan bahwa pajak iklan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Daerah Asli (PPN).

1.2 Rumusan Masalah

Kesulitan yang dibahas dalam proyek akhir ini dapat dinyatakan sebagai berikut berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan:

1. Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman untuk meningkatkan pendapatan dari pajak iklan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Tantangan apa yang dihadapi oleh BPKPD Kota Pariaman dalam meningkatkan pendapatan dari pajak iklan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan-tujuan berikut ini akan dicapai dengan proyek akhir berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan:

1. Untuk menentukan langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (BPKPD) Kota Pariaman untuk meningkatkan jumlah uang yang dikumpulkan dari pajak iklan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk menentukan tantangan yang dihadapi oleh BPKPD Kota Pariaman dalam meningkatkan pendapatan pajak iklan kota.

1.4 Metode Penulisan

Untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan perdebatan, proyek akhir ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Ringkasan yang menyeluruh dan metodis tentang keadaan atau aktivitas yang terjadi di organisasi tempat penulis menyelesaikan magangnya disajikan menggunakan pendekatan deskriptif.

Penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi untuk tugas akhir ini, termasuk:

1. Observasi

Pengelolaan pajak iklan di Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Pariaman menjadi subjek observasi langsung.

2. Percakapan

Komunikasi langsung dengan staf terkait digunakan untuk melakukan wawancara guna mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian, yaitu tentang manajemen dan inisiatif untuk meningkatkan pendapatan pajak iklan.

3. Tinjauan Pustaka

Berbagai bahan referensi tertulis, termasuk buku, peraturan terkait, dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung diskusi penelitian—khususnya, yang berkaitan dengan pajak daerah, pajak iklan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperiksa sebagai bagian dari tinjauan pustaka.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang tersebut berlangsung di Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Magang berlangsung dari tanggal 5 Januari 2026 hingga 4 Maret 2026, atau empat puluh hari kerja.

Divisi Pendapatan, yang bertugas mengawasi dan meningkatkan penerimaan pajak daerah, termasuk pajak iklan, yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, adalah tempat penulis ditempatkan selama magang.

1.6 Sistematika Penulisan

Proyek Akhir ini disusun menggunakan pendekatan metodis untuk setiap bab guna memberikan ringkasan tentang hubungan antara berbagai elemen yang dibahas. Berikut adalah rincian dari pendekatan metodis ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan dan justifikasi pemilihan pajak iklan sebagai sumber pendanaan lokal. Desain permasalahan, tujuan, teknik penulisan yang digunakan untuk menyusun tugas akhir, lokasi dan waktu magang, serta prosedur penulisan tugas akhir dijelaskan secara rinci.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam tugas akhir, termasuk definisi pajak, pajak daerah, pajak iklan, dan pendapatan asli daerah. Gagasan-gagasan ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan mengevaluasi topik-topik yang termasuk dalam proyek akhir.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini secara singkat menjelaskan tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di Kota Pariaman, tempat penulis menyelesaikan magangnya. Tujuan dan misi badan tersebut, struktur organisasi, serta tugas dan fungsinya dijelaskan secara singkat dalam bab ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas upaya-upaya Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Pariaman untuk meningkatkan pendapatan pajak iklan sebagai sumber pendapatan asli daerah, beserta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pengelolaan pajak iklan.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup rekomendasi untuk inisiatif meningkatkan pendapatan pajak iklan Kota Pariaman serta kesimpulan yang diambil dari temuan diskusi.